

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti memaparkan pengertian-pengertian dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Berbagai cara dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah bagi pelaksanaan kegiatannya. *Pertama*, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang di katagorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kedua*, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditunjukkan untuk memberikan

kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. *Ketiga*, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat. *Keempat*, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Warsito (2001:128) ‘‘Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah’’.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desantralisasi.

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga dikemukakan oleh *HAW. Widjaja*, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah serta pinjaman lain-lain (*widjaja.2002:110*).

Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya PAD sebagai sumber keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai persyaratan mendasar dalam sistem pemerintah Negara (*Koswara,1999:23*).

Menurut *Atep Adya Barata*, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah Pendapatan daerah dari semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Daerah (*Barata, 2004:90*). Menurut *Atep Adya Barata* dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

### **2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

a. Pajak Daerah,

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan dapat merasakan manfaat atau keuntungan tersebut secara langsung, karena pajak daerah ini akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintahannya. Pajak daerah merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan karena prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis – Jenis Pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

- Pajak Parkir
  - Pajak rokok
  - Pajak Kendaraan Bermotor
  - Pajak Air Permukaan, dll.
- b. Retribusi Daerah,

Retribusi Daerah adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan dalam pemungutannya dapat bersifat paksaan secara ekonomis karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Retribusi daerah ini dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dukumen lain yang dipersamakan. Beberapa jenis retribusi antara lain :

- Retribusi pelayanan kesehatan
  - Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - Retribusi terminal
  - Retribusi tempat khusus parkir
  - Retribusi pengujian kapal perikanan
  - Retribusi pelayanan pasar, dll
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan,

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan

sendiri. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini antara lain termasuk laba dari lembaga keuangan bank, laba dari Perusahaan daerah, dan laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah.

Sesuai dengan pasal 6 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah lainnya yang sah meliputi :

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa Giro
- Pendapatan Bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari hasil penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

### **Pajak Daerah**

Sesuai dengan Peraturan pemerintah No.65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan membangun daerah.

Pajak daerah merupakan pemungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah pembangunan daerah. Dengan demikian pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian,

pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah serta pelayanan publik (*public service*).

### **Fungsi Pajak Daerah**

Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Brotodiharjo dalam Halim, (2004: 131), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi pengaturan

Merupakan fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan negara/daerah.

Konsep ini sering dipergunakan pada sektor swasta.

### **Dasar Hukum Pajak Daerah**

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah

dan retribusi Daerah yang disahkan di Jakarta pada tanggal 20 desember 2000

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang disahkan di Jakarta dan berlaku pada tanggal 13 September 2001
- c. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang pajak daerah.

### **Jenis Pajak Daerah**

Menurut undang-undang no. 28 tahun 2009 :

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak rokok
2. Jenis pajak daerah (kabupaten/kota) terdiri dari :
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah

### **Retribusi Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa istilah lain yang terkait dengan retribusi daerah antara lain :

1. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

5. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

### **Objek Retribusi Daerah**

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan pasar

- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan Dana/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Yaitu retribusi yang dikarenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah
- b. Retribusi Pasar grosir atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan

- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Yaitu retribusi yang dikarenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan ;
- b. Retribusi izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin gangguan;
- d. Retribusi Izin trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

### **Pemanfaatan Retribusi Daerah**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**

Merupakan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain laba, dividend dan penjualan saham milik daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 196 tentang Perusahaan Daerah pasal 2 adalah dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

### **Tujuan dan Lapangan Usaha Perusahaan Daerah**

Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

### **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro

3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, dll.

### **Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah**

Adapun penjelasan lebih rinci yang termasuk dalam jenis lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, diantaranya sebagai berikut :
  - a. Penjualan peralatan/ perlengkapan kantor tidak di pakai
  - b. Penjualan mesin/alat berat tidak terpakai
  - c. Penjualan rumah jabatan/rumah dinas
  - d. Penjualan kendaraan dinas roda dua
  - e. Penjualan kendaraan dinas roda empat
  - f. Penjualan drum bekas
  - g. Penjualan hasil penebangan pohon
  - h. Penjualan perlengkapan lalu lintas
2. Jasa giro, diantaranya sebagai berikut :
  - a. Jasa giro kas daerah
  - b. Jasa giro pemegang kas
  - c. Jasa giro dana cadangan
3. Pendapatan bunga diantaranya yaitu Pendapatan bunga rekening deposito bank

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Beberapa alokator yang digunakan adalah nilai produksi bruto atau neto, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya yang dianggap cocok untuk menghitung nilai suatu unit produksi.

## **2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya menjelaskan perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan perubahan fundamental ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi digambarkan oleh pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu.

Sadono Sukirno (2006) mendefinisikan ”*Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya*”. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, mereka menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Lincoln Arsyad, 2009).

Simon Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 komponen *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Hal ini berarti jika penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Dalam konteks pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan PDB yang berarti juga pertumbuhan pendapatan per kapita (Tambunan, 2001). Suatu masyarakat atau suatu negara dikatakan mengalami adanya pertumbuhan ekonomi apabila dinegara tersebut terdapat lebih banyak output dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya.

### 2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

#### 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Sadono Sukirno (2006) mengatakan bahwa ahli-ahli ekonomi Klasik, dalam menganalisis masalah pembangunan terutama ingin mengetahui sebab-sebab perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan corak proses pertumbuhannya. Mereka memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka dari itu dipilih pandangan ahli ekonomi Klasik yang terkemuka:

##### a. Pandangan Adam Smith

Arsyad (2009) mengklasifikasikan agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith mudah dipahami, dibedakan menjadi dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu :

##### 1) Pertumbuhan Output Total

Unsur pokok dalam sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu :

- a) Sumber daya alam yang tersedia (atau faktor produksi tanah)
- b) Sumber daya insani (atau jumlah penduduk )
- c) Stok barang modal yang ada

Menurut Adam Smith sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dan kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum dari pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya,

maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal menurut Adam Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dan sumber daya alam).

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tak langsung maksudnya adalah peningkatan produktifitas per kapita yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, menurut Smith semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas per kapita.

Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan pertumbuhan output, menurut Smith karena spesialisasi tersebut bisa meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan.

Namun demikian, sebenarnya ada dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output yaitu :

- a) Makin meluasnya pasar, dan
- b) Adanya tingkat keuntungan diatas tingkat keuntungan maksimal

Menurut Smith potensi pasar akan bisa dicapai secara maksimal jika, dan hanya jika, setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penuh peraturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berdagang dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat disuatu negara maupun antara warga masyarakat antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *laissez-faire* dan *free trade*.

Faktor penunjang yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya akan mengurangi gairah pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal. Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurunkan dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

## 2) Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upahnya yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah diatas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun.

Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (DL) tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja (SL). Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

#### b. Pandangan David Ricardo

Ciri-ciri perekonomian menurut David Ricardo sebagai berikut :

- 1) Jumlah tanah terbatas
- 2) Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah/*natural wage*)

- 3) Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi
- 4) Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu
- 5) Sektor pertanian dominan

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produksi marginal (*marginal product*) yang dikenal dengan istilah *the law of diminishing return*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekankan tingkat upah ke bawah.

Proses yang dijelaskan di atas akan berhenti jika upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Sedangkan tingkat upah akan naik lagi sampai tingkat upah alamiah. Pada proses ini jumlah penduduk konstan. Jadi dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*.

Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktifitas tenaga kerja, artinya, bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya

akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini tidak lain adalah proses tarik menarik antara dua kekuatan dinamis yaitu antara *the law of diminishing return* dan kemajuan teknologi.

Sayangnya, proses tarik menarik tersebut akhirnya dimenangkan oleh *the law of diminishing return*, demikian Ricardo. Keterbatasan faktor produksi tanah (sumber daya alam) akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh alamnya. Apabila semua potensi sumber daya alam telah di eksploitir secara penuh maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat mencapai posisi stasionernya, dengan ciri ciri sebagai berikut :

- 1) Tingkat output konstan
- 2) Jumlah penduduk konstan
- 3) Pendapatan per kapita juga menjadi konstan
- 4) Tingkat upah pada tingkat upah alamiah (minimal)
- 5) Tingkat keuntungan pada tingkat yang minimal
- 6) Akumulasi modal berhenti (stok modal konstan)
- 7) Tingkat sewa tanah yang maksimal

### c. Thomas Robert Malthus

Suparmoko (1999) menyebutkan bahwa menurut Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang diperlukan untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara saja sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Jadi kenaikan jumlah penduduk saja bukan merupakan pendorong kemajuan ekonomi bilamana ia tidak membawa kenaikan permintaan efektif. Lagipula perkembangan penduduk, walaupun juga menambah permintaan efektif, belum tentu membawa perkembangan ekonomi.

## 2. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha, merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi : memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi

dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Maka menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan kepada dua golongan : penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai

tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary state*”. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan menurut Klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian yang telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

### 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik Solow – Swan

Arsyad (2009) menyebutkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi Klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevoer Swan.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow (1957) mengatakan bahwa peran dan kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Temuan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang setinggi 2,75 persen per tahun pada periode 1909-1949, sebesar 1,5 merupakan sumbangan dan kemajuan teknologi sedangkan sisanya disebabkan oleh penambahan jumlah penggunaan faktor produksi.

Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full*

*employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output-ratio* = COR) bisa berubah (bersifat dinamis). Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya “keluwesan” (fleksibilitas) ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

### **2.1.2.3 Metode Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi**

Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan penduduk di negara-negara lain (Sukirno, 2006) .

Menurut Boediono (1981), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, limapuluh tahun bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian itu, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dipertimbangkan PDRB riil satu tahun (PDRB<sub>t</sub>) dengan PDRB riil tahun sebelumnya (PDRB<sub>t-1</sub>), atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (PE)} : Pt = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$$

Keterangan : Pt = Pertumbuhan Ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan)

PDB(t-1) = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya (PDB<sub>t</sub> – PDB<sub>t-1</sub>)

Beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu:

#### 1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukuran pertumbuhan yang tepat, karena belum dapat

mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan, yaitu:

- 1) Cara Produksi. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor.

- 2) Cara Pengeluaran. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
  - 3) Cara Pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.
1. Produk Domestik Bruto Perkapita atau Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Produk domestik bruto perkapita baik ditingkat nasional maupun daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata. angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

### **2.1.3 Inflasi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Inflasi**

Teori kuantitas uang David Hume dalam Mankiw (2006) menyatakan bahwa bank sentral, mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tinggi atas tingkat inflasi, jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil,

tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat tingkat harga akan meningkat dengan cepat.

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang. Definisi di atas memberikan makna bahwa, kenaikan barang tertentu atau kenaikan harga karena panen yang gagal misalnya, tidak termasuk inflasi. Ukuran inflasi yang paling banyak digunakan adalah: *consumer price indeks* atau *cost of living indeks*.

Indeks ini berdasarkan pada harga dari satu paket barang yang dipilih dan mewakili pola pengeluaran konsumen. (Kuncoro, 1998:46) adalah kecenderungan dari harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada barang lainnya.

Menurut Boediono (1994:155) definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi dapat terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi ini di sebut *demand pull inflation*. Inflasi juga dapat terjadi karena biaya Produksi naik, ini disebut *cost push inflation*. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu digaris bawahi. Kenaikan harga-harga karena, musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi. A.W. Phillips

dari *London School of Economics* berhasil menemukan hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dan tingkat perubahan upah nominal (Samuelson dan Nordhaus, 1997:327). Penemuan tersebut diperoleh dari hasil pengolahan data empirik perekonomian Inggris periode 1861-1957 dan kemudian menghasilkan teori yang dikenal dengan Kurva Phillips.

Menurut Putong (2002:260), Inflasi dibedakan atas tiga jenis, antara lain:

- a. Menurut Sifatnya, Inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu :
  - 1) Inflasi rendah (*Creeping Inflation*), yaitu Inflasi yang besarnya kurang dari 10%
  - 2) Inflasi menengah (*Galloping Inflation*) besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut Inflasi dua digit.
  - 3) Inflasi berat (*High Inflation*), yaitu Inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan berubah.
  - 4) Inflasi sangat tinggi (*Hyper Inflation*), yaitu Inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai empat digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik di tukarkan dengan barang.
- b. Inflasi jika dilihat dari penyebabnya, yaitu :

*Demand Pull Inflation.* Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Oleh karena itu, untuk produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen, yaitu: pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik-menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

- c. Inflasi dibagi menjadi dua jika dilihat dari asalnya, yaitu:
- 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negarayang terlihat pada anggaran dan belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru.
  - 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara menjadi mitra dagang suatu negara mengalami Inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya didalam negeri tentu saja bertambah mahal.

### 2.1.3.2 Mengukur Inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya:

1. Indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer price index* (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
2. Indeks biaya hidup atau *cost-of-living index* (COLI).
3. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
4. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
5. Indeks harga barang-barang modal.
6. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

### 2.1.3.3 Metode Pengukuran Inflasi

Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Pada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju Inflasi (Nopirin, 1987:25) antara lain:

- a. Consumer price Indexs (CPI) Indexs yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup:

$$\text{CPI} = \left( \frac{\text{cost of market basket ingeven year}}{\text{cost of market basket in base year}} \right) \times 100\%$$

- b. *Producen price index* dikenal dengan *Whosale price index*.

Index yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah (*raw material*), bahan baku atau barang setengah jadi. Indexs TPI ini sejalan dengan indexs CPI.

- c. GNP Deflator

GNP deflator ini merupakan jenis index yang berbeda dengan index CPI dan PPL dimana index ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua index diatas:

$$\text{GNP Deflator} = \left( \frac{\text{GNP Nominal}}{\text{GNP Riil}} \right) \times 100\%$$

#### **2.1.3.4 Dampak Inflasi**

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. orang menjadi tidak bersemangat kerja,

menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pada tahun 2003 atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabung menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak

yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat merugikan apabila inflasi menyebabkan kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan mengurangi produksinya atau bisa juga berhenti untuk beberapa waktu. Hal ini juga bisa terjadi misalkan perusahaan tersebut bangkrut (tidak memproduksi lagi), dikarenakan tidak sanggup untuk mengikuti laju inflasi.

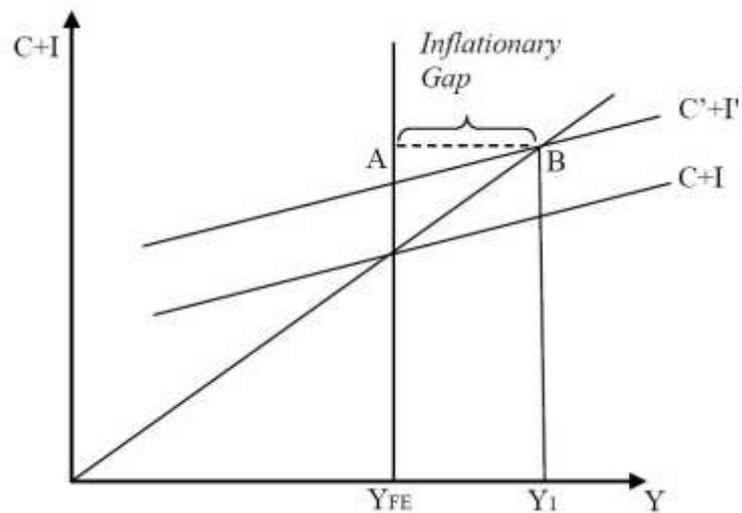
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit negaca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3.5 Faktor-Faktor Penyebab Inflasi**

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998:587), ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi:

#### *a. Demand Pull Inflation*

Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada diatas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya *Inflationary Gap*. *Inflationary Gap* inilah yang akan menyebabkan inflasi. Secara grafik digambarkan sebagai berikut :



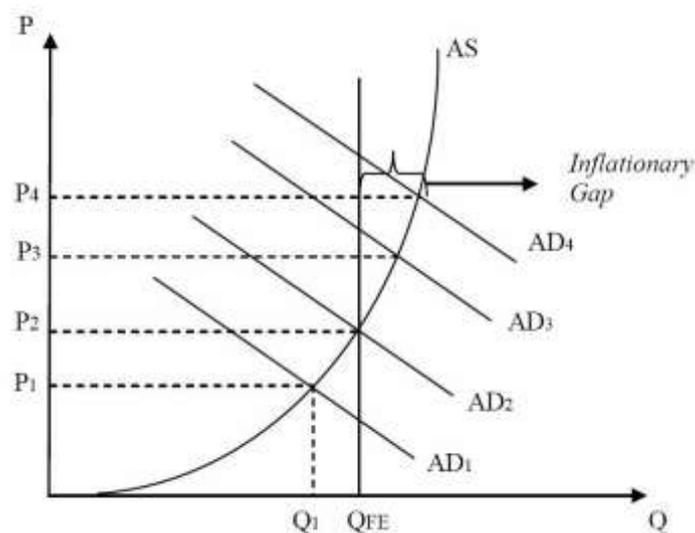
**Gambar 2.1**

*Inflationary Gap* (Demand Pull Inflation)

*Sumber : Boediono, Ekonomi Makro (1995)*

Kenaikan pengeluaran total dari  $C + I$  menjadi  $C' + I'$  akan menyebabkan keseimbangan pada titik B berada di atas GNP full employment ( $Y_{FE}$ ). Jarak A – B atau  $Y_{FE} - Y_1$  menunjukkan besarnya *Inflationary Gap*.

Dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran total proses terjadinya *demand-pull inflation* dapat dijelaskan sebagai berikut :



**Gambar 2.2**

***Demand Pull Inflation***

***Sumber : Boediono, Ekonomi Makro (1995)***

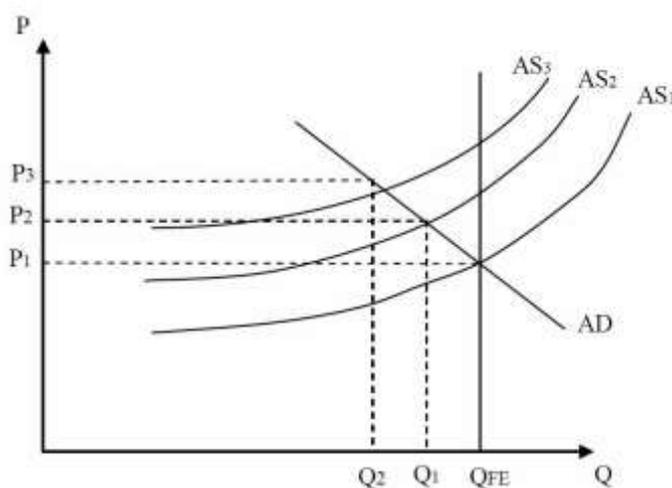
Bermula dengan harga  $P_1$  dan output  $Q_1$ , kenaikan permintaan total dari  $AD_1$  ke  $AD_2$  menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga naik menjadi  $P_2$  dan output naik menjadi  $Q_{FE}$ . Kenaikan  $AD_2$  selanjutnya menjadi  $AD_3$  menyebabkan harga naik menjadi  $P_3$  sedang output tetap pada  $Q_{FE}$ . Kenaikan harga ini disebabkan oleh adanya *Inflationary Gap*.

Proses kenaikan harga ini akan berjalan terus sepanjang permintaan total terus naik (misalnya menjadi  $AD_4$ ).

**b. *Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation***

Yaitu inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*Agregat Supply*) sebagai akibat kenaikan biaya

produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Serikat buruh yang menuntut kenaikan upah, manajer dalam pasar monopolitis yang dapat menentukan harga (yang lebih tinggi), atau kenaikan harga bahan baku, misalnya krisis minyak adalah faktor yang dapat menaikkan biaya produksi, atau terjadi penawaran total (Aggregate Supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Jika proses ini berlangsung terus maka timbul *cost push inflation*. Gambar berikut menjelaskan proses terjadinya *cost push inflation*.



**Gambar 2.3**

***Cost Push Inflation***

***Sumber : Boedion, Ekonomi Makro (1995)***

Bermula pada harga  $P_1$  dan  $Q_{FE}$ . Kenaikan biaya produksi (disebabkan baik karena berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh ataupun kenaikan harga bahan baku untuk industry) akan menggeser kurva penawaran total dari  $AS_1$  menjadi  $AS_2$ . Konsekuensinya harga naik menjadi  $P_2$  dan produksi turun menjadi  $Q_1$ . Kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi  $AS_3$ , harga naik dan produksi turun menjadi  $Q_2$ .

Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses kenaikan harga ini (yang sering disertai dengan turunnya produksi) disebut dengan *Cost Push Inflation*.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh *Demand Pull Inflation* dan *Cost Push Inflation* tetapi juga dipengaruhi oleh :

a) *Domestic Inflation*

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barangsecara umum di dalam negeri.

b) *Imported Inflation*

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang import secara umum.

## **2.1.4 Jumlah Penduduk**

### **2.1.4.1 Pengertian Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001). Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah. Menurut, *Population Reference Bureau* (PRB) (2011).

Penduduk menurut Badan Pusat Statistika (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Jawa Barat selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincoln Arsyad, 1997) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan tidak bisa mengimbangi jumlah penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsiten.

Menurut Maler (dikutip dari Mudrajat Kuncoro, 1997) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa lalu jumlah penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa jumlah penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

1. Jumlah penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian. Jumlah penduduk mengancam keseimbangan antara

sumber daya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena jumlah penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.

3. Jumlah penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

#### **2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk**

Secara umum ada tiga faktor utama demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, di antaranya sebagai berikut :

1. Kelahiran (Fertilitas)
2. Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan hidup. Berikut ini penjelasan mengenai pengukuran Kelahiran (Fertilitas) :
  - a. Pengukuran fasilitas tahunan adalah pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Adapun ukuran-ukuran fertilitas tahunan adalah :
    - Tingkat fertilitas kasar (*crude birth rate*) adalah banyaknya kelahiran hidup pada satu tahun tertentu tiap 1.000 penduduk.
    - Tingkat fertilitas umum (*general fertility rate*) adalah jumlah kelahiran hidup per-1.000 wanita usia reproduksi (usia 14-49 atau 14-44 tahun) pada tahun tertentu.

- Tingkat fertilitas menurut umur (*age specific fertility rate*) adalah perhitungan tingkat fertilitas perempuan pada tiap kelompok umur dan tahun tertentu.
  - Tingkat fertilitas menurut urutan urutan penduduk (*birth order specific rates*) adalah perhitungan fertilitas menurut urutan kelahiran bayi oleh wanita pada umur dan tahun tertentu.
- b. Pengukuran Fertilitas Komulatif adalah pengukuran jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia suburnya. Adapun ukurannya adalah :
- Tingkat fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan jumlah tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada priode waktu tertentu.
  - *Gross reproduction rates* adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1.000 perempuan sepanjang masa reproduksinya dengan catatan tidak seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa produksinya.

### 3. Kematian (Mortalitas)

Kematian adalah ukuran jumlah kematian umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per-1.000 individu per-tahun, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5 berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per-tahun.

#### 4. Perpindahan (Migrasi)

Migrasi adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam banyak kasus organisme bermigrasi untuk mencari sumber cadangan makanan yang baru untuk menghindari kelangkaan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin atau karena over populasi.

Rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami adalah :

$$Pa = (L-M)$$

Keterangan :

Pa = pertumbuhan penduduk alami

L = jumlah kelahiran

M = jumlah kematian

Sedangkan rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk total adalah :

$$Pt = (L-M) + (I-E)$$

Keterangan:

Pt = pertumbuhan penduduk total

L = jumlah kelahiran

M = jumlah kematian

I = jumlah imigrasi (penduduk masuk)

E = jumlah emigrasi (penduduk keluar)

#### 2.1.4.3 Dampak Jumlah Penduduk

1. lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang.
2. semakin banyaknya populasi dan limbah yang berasal dari rumah tangga, pabrik, perusahaan, industri, peternakan, dan lain-lain.

3. Angka pengangguran meningkat.
4. Angka kesehatan masyarakat menurun.
5. Angka kemiskinan meningkat.
6. Pembangunan daerah semakin dituntut banyak.
7. Ketersediaan pangan sulit.
8. Pemerintah harus membuat kebijakan yang rumit.
9. Angka kecukupan gizi memburuk.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai pengaruh jumlah penduduk, inflasi, PDRB dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas Inflasi	Menggunakan variabel Keuangan Daerah, Investasi, PDRB, Penduduk, Penerimaan Pembangunan	Menyimpulkan bahwa pengaruh investasi, PDRB, jumlah penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan inflasi berpengaruh positif dan	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013

	(PAD) di Kabupaten Lombok Barat (Karlina Batik,2013)			signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat	
2	Analisis Variabel Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali (Putu Lia Perdana Sari, 2013)	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan variabel bebas Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, Investasi, PDRB	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali. PDRB, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali.	jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Jinh Vol.2 No.2 Juni 2013
3	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013	Menggunakan variabel yang sama Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi	Menggunakan variabel terikat Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.	Menyimpulkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial pertumbuhan	file:///C:/Users/rse/Documents/Downloads/3164-Article%20Text-6339-1-20161006.pdf

	(Wirmie Eka Putra, Vinnie Alvionita, 2016)			ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD.	
4	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Prov Aceh Setelah Tsunami (Hewi Susanti, Mohd. Nur Syechalad, Abubakar Hamzah, 2017)	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas Pertumbuhan ekonomi	Menggunakan variabel bebas Pengeluaran Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Aceh	JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA Volume 4 Nomor 1, Mei 2017 E-ISSN. 2549-8355
5	Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang.	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dan variabel Bebas tingkat Inflasi	Menggunakan variabel bebas PDRB, Jumlah Penduduk	Hasil penelitian ini menunjukkan PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap	ASET Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.28 No.2 Oktober 2010: 133-151

---

	(Eni Aryanti dan Iin Indarti, 2010)			Tingkat Pendapatan Asli Daerah . Inflasi berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah	
6	faktor yang Berpengaruh Terhadap PAD Kota Denpasar (Gde Bhaskara Perwira Jaya dan AA Bagus Putu Widanta, 2014)	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan variabel bebas PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan	hasil analisis data menunjukkan bahwa PDRB, jumlah penduduk, Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap	jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.3 No.5 Mei 2014

---

				Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar.	
7	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal (Nadya Fazriana Haniz, Hadi Sasana, 2013)	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dan variabel Inflasi, Petumbuhan Ekonomi.	Menggunakan variabel bebas Pendapatan Per Kapita, Wajib Pajak	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Perkapita, Wajib Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal, variabel Inflasi mempunyai hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal.	Volume 3, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-13 <a href="http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme">http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme</a> ISSN (Online): 2337-3814
8	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas Inflasi	Menggunakan variabel bebas PDRB dan Jumlah Penduduk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel PDRB,	Vol. 2 No. 2 ISSN: 2089-3310, Juni 2013,

	(PAD) Di Kabupaten Sragen Tahun 1991–2013 (Iin Eko Pratiwi, 2015)			Jumlah Penduduk, dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen, variabel Jumlah Penduduk mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen.	hal. 715-737.
9	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau (Nelva Siskawati, 2014)	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi	Menggunakan variabel bebas Jumlah Penduduk, dan Panel Data	Hasil Penelitian menunjukkan Total Populasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pendapatan daerah antar kabupaten / kota di provinsi Riau	Jurnal Paradigma Ekonomi Vol.9, No.2, Oktober 2014
10	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi	Menggunakan variabel Bebas pertumbuhan ekonomi	Menggunakan variabel terikat Pendapatan Pajak	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (ISSN:

	terhadap Penerimaan Pajak Hiburan Di Wilayah Jabodetabek( Sarah Olivia dan Ivan Yudianto, 2016)	dan Inflasi	Hiburan	ekonomi dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat  Pendapatan Pajak Hiburan di Wilayah Jabodetabek, Inflasi dan pendapatan pajak hiburan mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan	0216- 0838), Volume 16, Issue 1, 2016
11	Pengaruh variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di kabupaten Karanganyar . (Triani dan Yeni Kuntari, 2010)	Menggunaka n variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas tingkat Inflasi	Menggunaka n Variabel Bebas PDRB dan Jumlah Penduduk	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Jumlah Penduduk mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur, variabel Inflasi mempunyai hubungan yang positif dan tidak	ASET Jurnal Ilmu Ekonomi , Vol.12 No.1 Maret 2010: 87-94)

---

berpengaruh  
signifikan

---

PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, laba, perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Potensi PAD dapat diketahui dengan menganalisis kontribusi penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah dan kontribusi komponen PAD terhadap penerimaan PAD yang dilakukan dengan analisis secara deskriptif dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan asli daerah.

#### **2.3.1 Hubungan LPE terhadap PAD**

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh

penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di Negara tersebut (Sukirno,2003:33)

Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan suatu negara atau daerah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari satu periode ke periode lainnya. Ada beberapa faktor yang dipandang oleh para ahli ekonomi sebagai sumber yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya: a. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

b. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

c. Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi

d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar LPE yang di peroleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan LPE maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD (Sarangih,2003). Pendapat ini sejalan dengan Hakim Halim (2002), bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Hubungan antara LPE dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari LPE, yaitu dengan meningkatnya LPE akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

### **2.3.2 Hubungan Inflasi terhadap PAD**

Mankiw (2006:87-88) Infalasi yang mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah, Mankiw mengutarakan bahwa, seluruh Pemerintah pusat ataupun daerah mengeluarkan uang. Sebagian dari pengeluaran ini yaitu untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja dan pemerintah, kepentingan publik), dan sebagian yang menyediakan pembayaran transfer (untuk orang miskin dan kaum lansia). Pemerintah bisa menandai pengeluarannya dalam tiga cara. *Pertama*, Pemerintah bisa ]meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. *Kedua*, Pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. *Ketiga*, Pemerintah bisa dengan mudah

mencetak uang. Dari itulah Pemerintah dapat memperoleh besaran dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997: 296), mengemukakan definisi inflasi adalah kejadian apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, seperti harga beras, bahan bakar mobil naik, tingkat upah, harga tanah, sewa barang modal juga naik. Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Untuk menentukannya diperlukan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen.

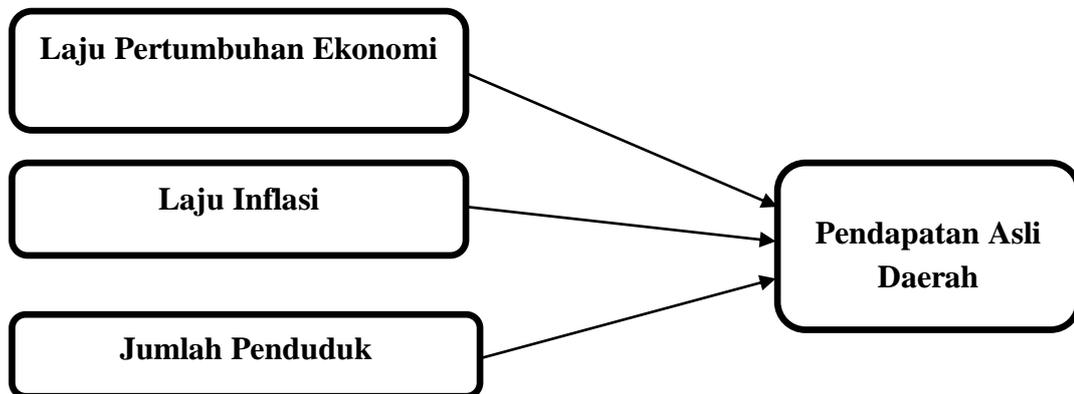
Maka hubungannya adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan kendala yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi tingkat produktifitas perekonomian di dalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah seperti halnya penelitian Muchtholifah (2010:4). Pendapatan seseorang akan menentukan inflasi, dari pengertian tersebut bahwa pendapatan seseorang yang meningkat secara nominal akan memberikan dampak peningkatan terhadap perolehan pendapatan asli daerah dan inflasi tidak dapat lepas dari adanya peningkatan upah kerja atau uang beredar di masyarakat. Semakin tinggi uang beredar di masyarakat akan semakin tinggi peningkatan inflasi dan akan semakin tinggi perolehan pendapatan di pemerintah daerah.

### **2.3.3 Hubungan Jumlah Penduduk terhadap PAD**

Smith (dikutip oleh Nelva Siskawati, 2014) Menjelaskan bahwa, dengan didukungnya bukti empiris, jumlah penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Nelva Siskawati (2014) mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. (wirosardjon,1998).

Dari penjelasan tersebut muncul suatu kerangka pemikiran yang dianggap perlu dilakukan pengujian berkaitan dengan perkembangan variabel makro yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap PAD.



**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **2.4 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang dipelajari yang dapat dibenarkan atau dapat ditangguhkan.

Dari uraian permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan di uji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Diduga laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif, sedangkan inflasi negatif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Diduga laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh positif, sedangkan inflasi negatif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.